BAB IV

PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana keterlibatan perempuan pada konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perempuan mempunyai satu peran yang secara tidak disengaja terjadi kepadanya yaitu sebagai korban dalam setiap terjadinya sebuah konflik. Setali tiga uang dengan peran diatas, perempuan yang berada ditengah-tengah konflik Rohingya ini juga merasakan peranan tersebut yaitu sebagai seorang korban. Selain hal tersebut, penulis juga ingin membuktikan apabila dalam kasus ini perempuan juga mampu memiliki peranan sebagai seorang agen perubahan dan berperan dalam resolusi konflik tersebut dengan berlandas dengan teori yang telah dijabarkan diatas serta resolusi dewan keamanan PBB 1325 yang didalamnya mengatur agar perempuan dapat turut serta dalam perdamaian global.

1. Perempuan sebagai Korban Dalam Konflik Rohingya

Sebagaimana yang telah penulis tulis pada bagian sebelumnya dalam skripsi ini apabila perempuan kerap kali menjadi pihak yang berada pada posisi korban pada setiap konflik yang terjadi di suatu wilayah. Hal serupa ternyata juga tetap berlaku pada konflik yang terjadi di wilayah Rohingya ini. Pihak perempuan dalam konflik ini menjadi korban mayoritas yang banyak sekali menerima berbagai perlakuan buruk oleh pihak lawan. Dalam konflik ini perempuan sering menjadi pihak yang menerima berbagai kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan. Beberapa hal yang dialami oleh kaum perempuan antara lain kekerasan fisik, penculikan, hingga terjadinya pemerkosaan yang dilakukan etnis lain yang menjadi lawan mereka dalam konflik tersebut.

Berbagai faktor menajdi latar belakang mengapa perempuan pada akhirnya selalu menjadi korban mayoritas

dalam sebuah konflik. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perbedaan perilaku berdasarkan gender. Menurut Mansour Fakih melalui bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, gender merupakan suatu sifat yang telah melekat baik pada perempuan maupun laki-laki dikarenakan terbentuknya suatu konstruksi sosial maupun kultural (Fakih, 1999). Melalui pengertian ini seringkali masyarakat mengkotak-kotakan berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, seperti perempuan identik dengan lemah dan tidak berdaya sedangkan laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok yang kuat dan pemberani. Hal inilah yang tertanam pada persepsi kebanyakan orang dan pada akhirnya memberikan kerugian bagi beberapa pihak khususnya perempuan.

Senada dengan apa yang dialami oleh berbagai perempuan yang berada di dalam satu wilayah konflik, hal serupa ternyata dialami oleh perempuan Rohingya. Perempuan Rohingya kerap kali menjadi korban dari berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual. Sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak hari pertama terjadinya konflik yang melibatkan etnis Rohingya dengan etnis Burma –salah satu etnis mayoritas di Myanmar- perempuan dan anak-anak merupakan berbagai pihak yang paling terkena dampak langsung dari terjadinya konflik tersebut. Ketika konflik Rohingya ini pecah kembali di tahun 2012, lagi-lagi perempuan menjadi korban dari kekejaman tentara Burma. Perempuan disana mengalami penyiksaan baik hanya sebatas penyiksaan fisiknya saja hingga dalam bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

Untuk mencegah kekerasan yang lebih brutal dari sebelumnya, para masyarakat etnis Rohingya memutuskan untuk pergi dari wilayahnya. Keputusan ini diambil oleh etnis Rohingya karena situasi setempat yang sudah tidak lagi kondusif untuk ditempati oleh mereka. Karenanya, para masyarakat etnis Rohingya ini melakukan pengungsian ke sejumlah Negara yang berada di dekat wilayah mereka, salah satunya Bangladesh. Para perempuan rohingya bersama masyarakat yang termasuk ke dalam etnis ini menempati

berbagai kamp-kamp pengungsian yang terdapat di beberapa Negara baik yang berada di dekat wilayah Rakhine maupun yang berada jauh dari wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan pengungsian ke berbagai Negara ini umumnya merupakan korban dari kekerasan yang ada di wilayah Rakhine, atau tempat mayoritas dari etnis Rohingya ini bermukim. Kekerasan yang dialami oleh masyarakat Rohingya ini seolah tidak pandang bulu, baik perempuan dan laki-laki mengalami hal yang sama. Hanya saja, jenis kekerasan yang menimpa kaum perempuan cenderung kearah kekerasan yang berbasis gender (*gender-based violence).* Kekerasan ini mengakibatkan perempuan mengalami berbagai macam pelecehan seksual dari pihak yang sedang bertikai, tidak memandang apabila perempuan masih dibawah umur, atau bahkan sudah memiliki suami.

Grafik 4. 1 Estimasi Perpindahan Pengungsi Rohingya ke Negara-negara tujuan utama

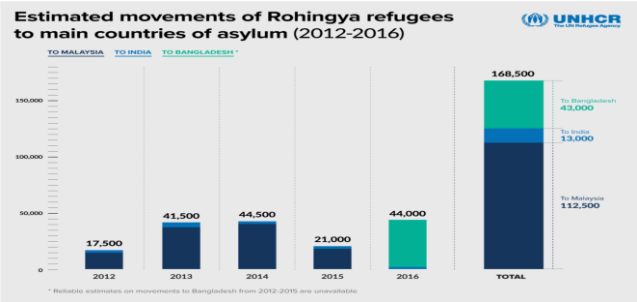

Source: UNHCR Report: Mixed Movements in South-East Asia 2016

Data diatas merupakan grafik jumlah pengungsi di berbagai Negara di Asia, yaitu India, Bangladesh dan Malaysia. Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa terjadi peningkatan jumlah pengungsi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terdapat 17.500 pengungsi yang hanya tersebar pada wilayah Malaysia. Hal yang terlihat mencolok terdapat pada

data di tahun 2016, dimana dari total 44.000 jumlah pengungsi yang melakukan pengungsian ke sejumlah Negara, sebanyak lebih dari 80% dari total tersebut menjatuhkan pilihannya ke wilayah Bangladesh yang merupakan wilayah terdekat dengan Rakhine tempat dimana konflik Rohingya terjadi (UNHCR, 2016).

Melalui data tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai Negara ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 60% dari total pengungsi tersebut merupakan perempuan, baik yang telah menikah maupun belum menikah. Perempuan-perempuan tersebut melakukan pelarian ke wilayah lain dikarenakan rasa tidak aman dan terancam yang mereka dapatkan dari situasi di wilayah tersebut. Tidak hanya perempuan, anak-anak juga menjadi sasaran mereka dalam melakukan kekerasan kepada pihak etnis Rohingya, hal tersebut telah masuk kedalam fase ethnic cleansing atau genosida.

Grafik 4. 2 Grafik pertumbuhan pengungsi rohingya di Bangladesh tahun 2017-2018

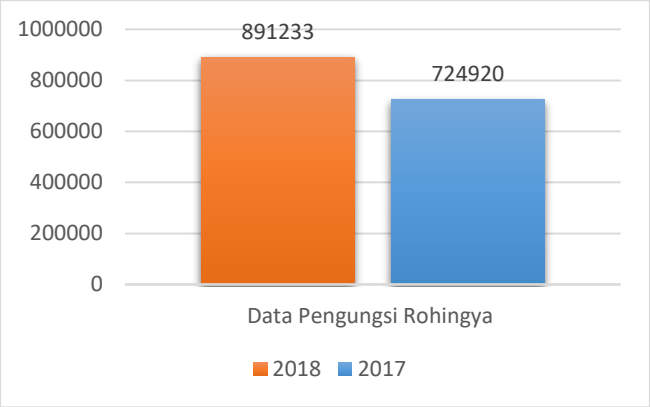

Source: UNHCR Operational Portal Refugee Situation

Data yang dikeluarkan oleh UNHCR mencatat pada tahun 2017 jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh melonjak tajam menyentuh angka 724.920 orang dimana terdapat 168.708 orang kepala keluarga didalamnya, sedangkan di tahun 2018 angka tersebut meningkat drastis ke angka 891.233 jiwa serta terdapat 205.290 kepala keluarga, dimana terdapat 51,9% dari total pengungsi diatas adalah perempuan (UNHCR: Operational Portal Refugee Situations, 2018). Pada data yang dikeluarkan UNHCR ini menyebutkan apabila perempuan menjadi jenis kelamin mayoritas para pengungsi Rohingya yang datang ke Negara lain. Melalui data lanjutan yang dilakukan oleh UNHCR untuk memantau jumlah pengungsi Rohingya ini dapat terlihat grafiknya yang melonjak pesat dibandingkan dengan jumlah pengungsi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa situasi di wilayah konflik sudah sangat tidak kondusif untuk ditempati.

Jika menggabungkan kedua hasil dari jumlah pengungsi serta persentase perempuan di dalamnya maka dapat dijadikan seperti grafik di bawah.

Grafik 4. 3 Grafik Peningkatan Jumlah Korban Kekerasan di Wilayah Konflik Rohingya

Source: *UNHCR Report: Mixed Movements in South-East Asia 2016 & UNHCR Operational Portal Refugee Situation*

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat terdapat kenaikan signifikan korban kekerasan di wilayah konflik Rohingya per tahunnya. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 10.500 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2013 dimana terdapat sebanyak 24.900 korban perempuan. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan di tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 26.700, 12.600, dan 26.400 orang perempuan. Data ini didapat dari 60% jumlah perempuan yang melakukan pengungsian pada tahun tersebut. Sedangkan, data di tahun 2017 dan 2018 sebanyak 376.233 dan 462.549 orang perempuan. Melihat data diatas, dapat terlihat perbedaan mencolok dari data 2012 hingga 2016 dengan data di tahun 2017 dan 2018. Jumlah tersebut di dapat dari data 51, 9% jumlah persentase perempuan yang menjadi pengungsi di Negara-negara lain.

Gambar 4. 1 Persebaran pengungsi Rohingya di Bangladesh

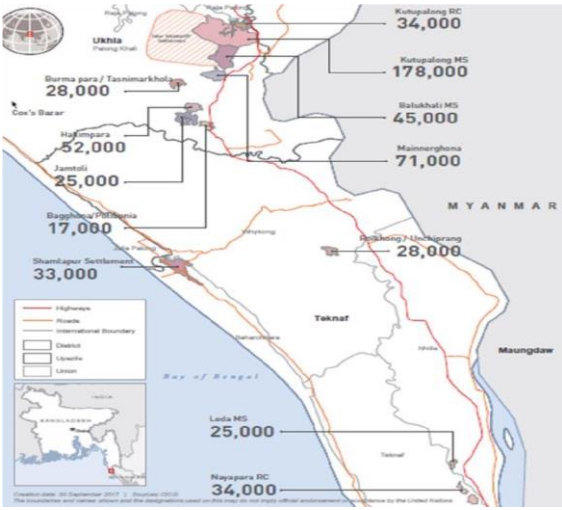

Source: Inter Sector Coordination Group, Humanitarian Response Plan September 2017 - February 2018, 30 September 2017 via Mission report of OHCHR rapid response mission to Cox's Bazar, Bangladesh

Gambar diatas merupakan peta persebaran para pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017. Dalam peta tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 12 titik atau lokasi persebaran pengungsi Rohingya di Bangladesh, dimana wilayah Kutupalong MS menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak sejumlah 178.000 jiwa.

Kebanyakan dari korban tersebut merupakan perempuan yang merupakan korban dari kekerasan seksual dimana perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil. Selain itu, banyak dari perempuan hamil yang berada di kamp-kamp pengungsian ini merupakan perempuan dibawah umur. Senada dengan data yang diberikan oleh UNHCR diatas, UNFPA juga mengungkapkan pada awal paruh waktu kedua tahun 2017, sebanyak 120.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban dari kekerasan yang membludak di wilayah utara Rakhine dan memaksa mereka pada akhirnya untuk lepas dari situasi tersebut, dimana 24.000 orang diantaranya merupakan ibu hamil dan menyusui (UN News, 2017). Umumnya, perempuan yang menjadi korban ini merupakan perempuan yang berada di usia terbaik dalam hal reproduktif. Jumlah korban perempuan dalam konflik Rohingya ini terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan berlanjutnya konflik tersebut.

Namun, ternyata dibalik semua hal tersebut, perempuan mampu berperan dalam menjadi agen perubahan dalam suatu konflik atau permasalahan. Untuk itu, hal tersebut akan penulis bahas di subbab selanjutnya.

2. Perempuan Sebagai Agen Perubahan

Peran perempuan sebagai agen perubahan dalam suatu konflik sampai saat ini masih dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak. Banyak pihak menyangsikan kemampuan perempuan dalam menangani suatu konflik, namun tidak jarang beberapa pihak mendukung aksi perempuan ini untuk ikut serta berkontribusi dalam menciptakan sebuah resolusi konflik. Adanya beberapa faktor pendukung jadi penentu apakah perempuan tersebut dapat menyalurkan aspirasi serta pemikirannya untuk menciptakan sebuah resolusi konflik, serta adanya peranan politik yang mampu mendukung perempuan tersebut dalam memperlancar misinya sebagai agen perubahan dalam suatu konflik.

Dalam melaksanakan peran sebagai agen perubahan ini, perempuan menggunakan kesempatan politiknya. Perempuan Myanmar ikut berpartisipasi dalam sistem pemerintahan Negara tersebut, yang dibuktikan dengan terdapatnya Aung San Suu Kyi sebagai salah satu tokoh perempuan dalam parlemen Myanmar. Namun, tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan Myanmar ini masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase keikutsertaan perempuan dalam semua kursi pemerintahan hanya sekitar 13% dari total keseluruhan penduduk Myanmar yang berjumlah 52 juta orang (UN Women Asia and the Pacific, 2016)

Jika dikaitkan dengan kasus Rohingya, perempuan di wilayah konflik ini umumnya menjadi korban yang mengalami kekerasan berdasarkan gender. Sejarah kelam tersebut tidak hanya terjadi di Rohingya saja, namun terdapat di berbagai wilayah yang mengalami konflik juga. Dalam kasus yang terjadi di Rohingya ini memang peran perempuan sebagai agen perubahan belum begitu mencolok dan masih di dominasi oleh berbagai data yang menyebutkan bahwa perempuan hanyalah berperan sebagai korban dalam konflik ini. Namun, ternyata terdapat beberapa pihak baik itu dari individual maupun kelompok aktivis yang telah ataupun

sedang memperjuangkan hak-hak perempuan Rohingya ini, salah satunya adalah Wai Wai Nu.

Wai Wai Nu merupakan seorang aktivis Myanmar keturunan Rohingya yang aktif dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan khususnya perempuan yang berada di wilayah konflik Rakhine. Nu adalah putri dari seorang politikus Kyaw Min Nu yang juga ikut berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi kalangan pekerja. Selain itu, Nu pernah menjadi seorang tahanan Negara ketika ia berada pada usia 18 tahun. Aksi yang dilakukan pemerintah setempat terhadap Nu ini merupakan salah sattu bentuk diskriminasi etnis, dimana Nu yang merupakan seorang Rohingya dan pemerintah yang mayoritas beretniskan Burma. Nu dan keluarganya merupakan seorang Rohingya, sebuah etnis minoritas di Myanmar beragamakan Islam yang sangat dibenci di Negara tersebut dan dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Selama kurang lebih 7 tahun, Nu dan keluarga menghabiskan waktunya di dalam penjara bersama para tahanan politik lainnya. Pada tahun 2012 dibawah kepemimpinan presiden Thein Sein akhirnya Nu memperoleh kebebesannya yang segera ia gunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Rohingya, khususnya perempuan. Pada tahun yang sama, Wai Wai Nu mendirikan sebuah NGO yang bernama *Women's Peace Network Arakan*. NGO ini dibentuk dalam rangka mempromosikan pengertian yang lebih baik antara etnis Rohingya dengan masyarakat lain yang tinggal di wilayah Rakhine. Selain bergerak di dalam negeri, Organisasi *Women's Peace Network Arakan* ini juga menjangkau luar negeri dalam rangka merangkul masyarakat dari segala kalangan serta mencoba untuk menciptakan perdamaian dan lingkungan yang aman bagi semua orang.

Selain mendirikan organisasi non-pemerintah, usaha lain yang dilakukan Nu adalah menjadi seorang politikus muda. Langkahnya ini sedikit banyak membantu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Rohingya agar lebih

mudah terdengar oleh pemerintah. Nu juga turut berperan aktif dalam menyuarakan kondisi yang dialami perempuan Rohingya ke dunia Internasional. Selain itu, Nu juga merupakan seorang Co-Founder dari organisasi *Justice for Women* yang merupakan suatu organisasi jaringan pengacara-pengacara perempuan yang memberikan bantuan hukum kepada perempuan di Myanmar.

Tujuan utama dari jaringan pengacara perempuan ini adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada perempuan melalui beberapa nasehat hukum serta memberikan pendidikan kepada mereka tentang hak asasi manusia. Salah satu contoh nyata peran mereka dalam kasus ini adalah menyelenggarakan lokakarya di seluruh wilayah Rakhine yang bertujuan untuk mendidik perempuan-perempuan muda tentang bagaimana cara memerangi pelanggaran yang secara umum biasa terjadi di Myanmar seperti pelecehan seksual dan kekerasan lainnya. Menurutnya, tindakan ini merupakan sebuah investasi masa depan bagi negaranya yang lebih dari sekedar melakukan sebuah tindakan keadilan.

Salah satu contoh aksi Wai Wai Nu dalam mengkampanyekan #MyFriend yang merupakan salah satu proyek onlinenya di tahun 2015. Nu bertujuan untuk menentang berbagai kalimat kebencian serta mendorong para pengguna media sosial untuk mengabadikan foto mereka dengan temannya yang datang dari berbagai latar belakang etnis serta agama yang berbeda (Jones, 2017). Dari sana, Nu mengharapkan bahwa masyarakat mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama sebagai makhluk sosial tanpa mengkotak-kotakan etnis serta agama yang dianut. Melalui kampanye ini, Nu juga secara tidak langsung membantu membuka mata berbagai pihak atas kondisi dan situasi yang saat ini dialami oleh masyarakat Rohingya. Kampanye yang digagas oleh Wai Wai Nu ini sukses menjadi viral dan tersebar luas di dunia maya, yang membuat namanya semakin dikenal sebagai seorang aktivis.

Selain Wai Wai Nu, penulis menemukan adanya kontribusi pihak perempuan lain sebagai agen perubahan pada konflik di Rohingya. *Karen Women's Organisation* merupakan salah satu organisasi yang juga mempunyai peranan penting dalam menjadi agen perubahan di Rohingya. *Karen Women's Organisation* ini dibentuk pada tahun 1949 yang memiliki tujuan awal untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada konflik internal yang terjadi di Karen. Namun, seiring berjalannya waktu, KWO memperluas fokusnya tidak hanya pada perempuan Karen melainkan pada seluruh perempuan yang terjebak dalam wilayah konflik, salah satunya Rohingya. Organisasi non-pemerintah ini memiliki peranan dalam proses resolusi konflik Rohingya di Myanmar. Salah satu tindakan yang dilakukan *Karen Women's Organisation* ini adalah mengirimkan sebuah pernyataan terhadap beberapa pihak terkait.

Karen Women's Organisation menyampaikan surat terbukanya kepada beberapa tokoh penting di pemerintahan seperti *People's Assembly* Pyithu Hluttaw, *House of Nationalities* Amyotha Hluttaw, *The State Conselor of Myanmar* Daw Aung San Suu Kyi serta seluruh perwakilan etnis yang berada di Myanmar untuk mengakhiri pembatasan kewarganegaraan serta kebebasan bagi masyarakat Rohingya. Dalam hal ini pihak KWO meminta agar para petinggi Negara tersebut untuk mengambil tindakan bagi proses perdamaian terhadap konflik tersebut. Pihak KWO berpendapat bahwa pihak militer Burma tidak seharusnya dibiarkan berlanjut dengan impunitas. Menurutnya, ini merupakan saat yang tepat bagi semua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam hal hak etnis serta sistem pemerintahan yang berpihak pada setiap etnis dan kalangan, termasuk Rohingya.

Selain itu, pihak KWO juga memberikan seruan yang sama kepada pihak Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa serta Negara lain yang berperan dalam memberikan pelatihan militer serta kerja sama dalam bentuk apapun kepada pihak militer Burma untuk menghentikan kerja sama dan

keterlibatannya. Pihak KWO menginginkan agar pihak militer Burma diperlakukan selayaknya penjahat perang, mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada para korban khususnya perempuan. KWO menginginkan pemerintah meninjau keterlibatan pihak militer Burma dengan pemerintah sipil terkait dengan lambannya kinerja pemerintah sehingga menjadikan penduduknya sebagai target militer dari pihak tersebut. Selain itu, KWO juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan sanksi ekonomi serta pergeseran bantuan dari berbagai proyek pemerintah Burma ke dalam bentuk bantuan serta dalam bentuk kemitraan dengan kelompok Rohingya (Karen Women's Organisation, 2017).

Pihak KWO menilai telah terjadi standar ganda yang diterapkan terhadap kasus genosida di Rohingya ini oleh pemerintah, serta mengaitkan perjuangan mereka untuk keadilan dan hak-hak di hadapan pasukan militer Negara Burma yang telah melumpuhkan dan membunuh rakyat mereka sendiri selama beberapa dekade belakangan ini. Menurut KWO dibutuhkan kerjasama yang lebih erat dan kuat lagi dari beberapa etnis minoritas yang mengalami hal serupa seperti Rohingya dalam menghadapi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar serta militer Burma. Dengan adanya persatuan dari seluruh etnis minoritas ini akan membuat Myanmar menghargai serta menghormati hak-hak kebangsaan mereka sebagai warga Negara.

Selama tahun 2016 pihak KWO terus menerima laporan-laporan yang menyangkut soal penyiksaan, pembunuhan, serta kehilangan yang dialami oleh kelompok Rohingya. Hal yang terjadi pada kelompok Rohingya ini merupakan perbuatan dari para tentara Burma yang menginvasi wilayah mereka. Setidaknya, pada tahun 2016 tercatat terdapat sebanyak 428 kasus kematian serta 192 kasus penghilangan masyarakat Rohingya. Sepanjang tahun 2005 hingga 2016 terdapat sebanyak 33 laporan terpisah tentang kekerasan terhadap perempuan Rohingya yang dilakukan oleh tentara Burma. Namun, pemerintah Myanmar tetap menolak

serta menyangkal berbagai bukti yang telah dipaparkan (Burma Task Force, 2016).

Daw Aung San Suu Kyi sebagai perwakilan pihak pemerintah menyatakan bahwa pemerkosaan yang terjadi di Myanmar itu dilakukan sebagai upaya melawan mereka yang hanya ingin menuntuk hak asasi mereka saja, khususnya di wilayah nasionalitas etnis. Melihat dari bagaimana Aung San Suu Kyi menyatakan pendapatnya mengenai berbagai laporan yang masuk terkait kekerasan yang dialami perempuan di konflik Rohingya tersebut merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi berbagai pihak. Mengingat Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian PBB ini, sikapnya sangat bertolak belakang dengan penghargaan yang ia dapatkan. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Burma ini tidak akan terjadi ketika ia berkuasa, atau jika hal tersebut sudah terlanjur terjadi hal tersebut akan segera ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah.

Dari berbagai pemaparan diatas, perempuan ternyata memiliki dua peran dalam terjadinya konflik yaitu sebagai korban dan sebagai agen perubahan. Perempuan ketika menjadi korban menerima berbagai kekerasan dari pihak yang terlibat konflik. Salah satu contoh kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah kekerasan berbasis gender atau yang lebih dikenal sebagai *Sexual Gender Based Violence*. Selama konflik Rohingya kembali muncul di tahun 2012 hingga sekarang terdapat ratusan ribu hingga jutaan orang yang mengungsi dan mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Namun, dibalik peran perempuan sebagai korban ini perempuan juga ternyata mampu menunjukan perannya sebagai seorang agen perubahan. Salah satu contoh dari peran perempuan sebagai agen perubahan khususnya dalam konflik di Rohingya dilakukan oleh Wai Wai Nu dan *Karen Women's Organisation*. Wai Wai Nu dan *Karen Women's Organisation* melakukan berbagai kritik terhadap pemerintah Myanmar agar

cepat melakukan proses perdamaian agar tidak lebih banyak korban yang jatuh terutama perempuan sebagai mayoritas korban. Selain itu, berbagai aktivis juga menyoroti peraturan perundang-undangan di Myanmar khususnya pada pasal kewarganegaraan agar pihak Rohingya menerima haknya sebagai warga Negara resmi Myanmar.